

KERANGKA KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DALAM PERSPEKTIF PERILAKU PEMUDA KABUPATEN CIANJUR SEBAGAI PEMETAAN DASAR-DASAR BEHAVIORAL TRANSFORMASI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Moch. Agung Lukmanul Hakim¹⁾, Cecep Darmawan²⁾, Leni Anggraeni³⁾

¹²³FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

¹mochagung.lukmanulhakim@upi.edu

²cecepdarmawan@yahoo.com

³l_anggraeni@upi.edu

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :
Submit, 13 Nopember 2022
Revisi, 3 Desember 2022
Diterima, 31 Desember 2022
Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Behavioral
Kebijakan
Kepemudaan
Pelayanan
Transformasi

ABSTRAK

Penelitian dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis data sekunder ini bertujuan melakukan penyelidikan terkait dasar-dasar behavioral dari transformasi pelayanan kepemudaan yang lebih realistis dalam menunjang tahap perkembangan pemuda terutama pada transisi adolesens yang penuh dengan gejala. Adapun hasil penelitian ini telah memberikan proyeksi behavioral sebagai dasar dari transformasi yang harus dimanifestasikan ke dalam pelayanan kepemudaan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan pemuda sebagai berikut: (1) Bagian krusial dalam proses pembangunan pemuda yang konstruktif tidak lain membangun kerangka kebijakan sebagai pengaturan hubungan harmonis antara pikiran, pengalaman dan emosional sebagai representasi bagian internal dari perilaku itu sendiri yang dapat diobservasi secara konkret. (2) Karena perilaku hanya dapat akurat dipahami dalam korelasi dengan perilaku lain sebagai penyebab proksimal akselerasi penguatan dari perilaku tertentu, maka kerangka kebijakan harus memungkinkan pemuda terlibat langsung dalam program variatif sesuai kebutuhan dengan alokasi waktu tertentu. (3) Karena *Classical Conditioning* sebagai intervensi psikologis dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan dalam taraf signifikansi, maka opsi pengaturan *default* kebijakan dapat dipertimbangkan melalui mekanisme relasi kausalitas dan seleksi dari *default* kebijakan kepemudaan sendiri. (4) Secara natural lingkungan perkembangan dapat mendorong perubahan perspektif, perilaku dan tindakan, maka kerangka kebijakan kepemudaan yang transformatif harus memuat kombinasi antara perilaku dan relasi fungsional dengan lingkungan perkembangan melalui pengkondisian artifisial. (5) Menimbang pada model berbasis intensionalitas perilaku merupakan responsivitas terukur, maka kerangka kebijakan harus menjadi stimulus natural terhadap potensi keterlibatan sebagai respons yang dikondisikan melalui intensionalitas. Sementara implikasi dari penelitian ini, akan memberikan tumpuan behaviorisme yang relevan untuk ditindaklanjuti melalui *Design and Development Research* dari pelayanan kepemudaan yang sesuai kebutuhan perkembangan pemuda di masa mendatang

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Moch. Agung Lukmanul Hakim
Universitas Pendidikan Indonesia
Email: mochagung.lukmanulhakim@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Sebagai faktualitas empiris, kalangan pemuda di Kabupaten Cianjur memiliki persepsi konstruktif baik terhadap kerangka kebijakan kepemudaan secara nasional maupun pembangunan pemuda berbasis pendekatan Organisasi 4-H, yang seksama direpresentasikan dalam pengukuran tingkat responsivitas dan harapan keterlibatan dalam pelayanan kepemudaan yang relatif tinggi (Hakim, 2022). Persepsi demikian secara kontekstual memberikan ilustrasi bahwa tidak terdapat perasaan diskriminasi dan prasangka implisit sebagai aktualisasi gagasan konvensional, sekalipun sampai dewasa ini masih terdapat distorsi dalam konteks persamaan gender, distorsi dalam konteks interaksi dan distorsi terkait psikologi kerja sama antara kelompok sasaran dengan implementor kebijakan, yang menghambat kinerja implementasi kebijakan kepemudaan sendiri (Hakim, 2022). Hanya saja, konstruksi dasar persepsi kalangan pemuda melalui proyeksi operasionalisasi responsivitas dan keinginan keterlibatan dalam pelayanan kepemudaan tidak lebih dari pemetaan orientasi nilai yang bahkan mempunyai karakteristik yang sangat plastis dengan artikulasi dan trajektori utama dari struktur signifikansi persepsi mudah berubah terhadap perubahan dari stimulus. Karena bagaimanapun juga, penyelidikan tentang orientasi nilai akan selalu holistik dihadapkan dengan probabilitas distorsi pada taraf signifikansi tertentu. Konstruksi signifikansi persepsi kalangan pemuda sebagai samaran kontinum generalisasi dari analisis induktif, tidak dapat dipungkiri akan bergantung pada konstruksi artikulasi tersamar tertentu dalam instrumen kuesioner.

Sekalipun memperlihatkan persepsi konstruktif terhadap kerangka kebijakan, namun kalangan pemuda secara umum tidak mempunyai pengalaman keterlibatan pada program penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan baik kepemimpinan, kewirausahaan maupun kepeloporan dalam skema implementasi pemerintah Desa, Gerakan Pramuka, Karang Taruna, DPD KNPI, Disparpora Kabupaten Cianjur dan masyarakat umum, yang dinilai juga tidak terlibat secara koheren dalam menunjang perkembangan pemuda (Hakim, 2022). Skema implementasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur belum berdasar pada perkembangan paradigma pembangunan pemuda pada praktik global, sehingga kalangan pemuda tidak pernah terlibat ke dalam program pasca sekolah, komunitas sehat, mobilisasi orang dewasa bahkan kewirausahaan baik sosial maupun politik sebagai program holistik (Hakim, 2022). Dalam konteks paradigma pembangunan pemuda sebagai konsensus terbaru, terdapat perhitungan tentang implikasi realitas sosial terhadap pemuda (Woodman dan Wyn, 2013) dengan membangun kebijakan yang dapat menunjang transisi dari pemuda menuju

kedewasaan (Ginwright, Cammarato dan Noguera, 2014). Karena itu, kebijakan kepemudaan harus mengilustrasikan pemetaan lokus pengembangan pemuda seperti kepedulian, konektivitas, karakteristik, kepercayaan diri, kontribusi dan kompetensi (Lerner., dkk, 2013) sebagai model 7K *Positive Youth Development* (PYD).

Model 7K PYD mempunyai potensi dan probabilitas tinggi dalam memajukan pembangunan kalangan pemuda baik sebagai praktik pengembangan, kebijakan dan penelitian ilmiah terutama di negara *Low-And Middle-Income Countries* (LAMIC) seperti Pakistan, India dan Indonesia (Dimitrova dkk., 2021). Konstruksi model 7K PYD merupakan pengembangan indikator dari 6K dengan seksama mensintesiskan komponen kreativitas dalam konsep dasar pembangunan pemuda sebagai cerminan dari kemampuan pemecahan berbagai permasalahan dalam konteks sosial-kultural. Pembangunan pemuda berbasis pengembangan 7K di Peru dan Kolombia secara menjanjikan akan mengurangi pengalaman keterlibatan pemuda dalam penggunaan narkoba, konsumsi alkohol, tindakan kekerasan dan bunuh diri (Manrique-Millones dkk., 2021), sehingga dapat diandalkan secara psikometrik sebagai penanggulangan tindakan beresiko. Penerapan PYD dengan mempertimbangkan aset perkembangan pemuda seperti lingkungan dan dimensi interpersonal berkorelasi secara konstruktif dengan prestasi akademik dan perilaku prososial sebagaimana ditunjukkan penelitian di Serbia, Makedonia, Kosovo, Albania (Uka dkk., 2021) bahkan Australia (Bradley, Ferguson dan Zimmer-Gembeck, 2021), karena struktur dukungan sosial mencakup konstruksi antara identitas positif, kompetensi sosial dan tingkat prestasi akademik dalam samaran kontinum inheren (Kosic, Wium dan Dimitrova, 2021).

Pembentukan identitas antara kalangan pemuda secara konstruktif merupakan sasaran perkembangan dari kebijakan yang memungkinkan identifikasi keberadaan identitas dalam berbagai komitmen terhadap peran dan konteks tertentu, karena hal demikian sangat krusial dalam PYD. Penelitian di Turki dengan berbasis kerangka aset pembentukan identitas diselenggarakan untuk mengadakan pengujian terhadap asumsi dasar bahwa individualisme dan lingkungan sosial eksternal menjadi bentuk aset perkembangan yang signifikan dalam membangun identitas serta kepercayaan, yang menunjukkan terdapat jalur bifurkasi secara langsung dan tidak langsung antara aset pembangunan dengan identitas (Dost-Gözkán dan Wium, 2021) yang koheren dengan tingkat pemaknaan kehidupan. Survei *Cross-Sectional* dengan sampel 5802 pemuda Irlandia menemukan bahwa pengalaman destruktif dari keluarga dan kasus pelecehan secara seksual berkorelasi dengan tingkatan kepuasan hidup yang lebih rendah, sementara pengalaman sosial yang

konstruktif dengan dukungan keluarga, teman sebaya, sekolah dan keterlibatan dalam kegiatan olahraga terkait secara lebih konkret dengan kepuasan hidup lebih prima (Asgeirsdottir dan Sigfusdottir, 2021). Studi *Cross-Sectional* dengan partisipan mencapai 768 berhasil menunjukkan bahwa rasa syukur dan optimisme menjadi entitas mediator parsial dari hubungan diantara sejumlah komponen PYD terdahulu dengan kebahagiaan bersifat subjektif (Gomez-Baya, de Matos dan Wiium, 2021).

Rumania, Norwegia, Italia dan Bulgaria merupakan negara yang memberikan konteks distingtif terbaru dalam menerapkan PYD, karena perbandingan berkenaan sampel bahkan hampir tidak pernah terlihat antara Eropa Utara, Timur dan Selatan. Rumania dan Bulgaria menjadi dua negara yang berkembang pasca runtuhnya asas komunisme pada tahun 1980, yang secara historikal berbeda dengan Italia sebagai representasi negara patriarki dan Norwegia yang didorong kesetaraan sosial. Bahwa penelitian yang utuh memberikan analisis terkait invarians pengukuran dan struktur faktorial sebagai skala pengukuran yang diaplikasikan pada formasi sampel berbeda akan merepresentasikan karakteristik psikometrik yang relevan dengan komponen PYD misalnya domain kepedulian, konektivitas, kepercayaan diri, karakteristik dan kompetensi (5K). Penyelidikan terhadap faktor konfirmatori telah memberikan arah dukungan berkaitan penerapan model 5K dalam pembangunan pemuda di berbagai negara tersebut termasuk model 5K sendiri dapat dipergunakan sebagai pengukuran yang kredibel (Dimitrova dkk, 2021). Model 5K PYD memberikan kerangka kerja berbasis kekuatan ideal untuk menilai kualitas optimal generasi muda. Berdasarkan hasil *Structural Equation Modeling* (SEM) menunjukkan bahwa harapan lebih untuk masa depan dari generasi muda terkait dengan kepuasan hidup melalui peran dalam mediasi 5K dalam PYD (Fernandes dkk., 2021).

Misalnya, model 5K PYD yang diukur melalui studi *Cross-Sectional* dengan 995 pemuda dan orang dewasa Ghana yang menerapkan pendekatan 5K dalam PYD terkait masalah lingkungan. Hasil pemodelan persamaan struktural mencerminkan bahwa karakteristik menampilkan trajektori terhadap tanggung jawab konsumen dan pemerintah terkait lingkungan, kompetensi dengan keyakinan polusi tidak memiliki kaitan dengan syarat pertumbuhan industri, kepercayaan diri dan kepedulian terkait dengan orientasi kompetensi dan niat konservasi (Kabir dan Wiium, 2021). Bahwa perspektif dalam pembangunan pemuda yang konstruktif bahkan dapat diterapkan dalam menganalisis relasional antara orang dewasa dengan orang tua bersangkutan di Brasil. Hasil kajian mencerminkan bahwa orang dewasa yang berasal dari situasi SES berbeda ternyata bervariasi dalam ruang transisi, kemandirian dan probabilitas eksplorasi identitas bahkan keluarga bertindak sebagai faktor promotif PYD selama masa

dewasa yang baru datang (Dutra-Thomé dan Ponciano, 2021). Terkait gender, penelitian di Ghana dan Norwegia memperlihatkan kalangan pemuda di Norwegia mendapatkan lingkungan yang optimal untuk pembangunan dengan sebagian besar perempuan melaporkan aset pembangunan, sementara kesetaraan gender di Ghana terkonfirmasi, karena keberadaan perempuan dilaporkan setara dalam sejumlah kasus (Wiium dan Kozina, 2021).

Pembangunan pemuda berbasiskan model 5K, memiliki abstraksi persamaan karakteristik dengan 15 konstruksi psikologi yang dikembangkan proyek PATHS di Tiongkok. Dengan mempertimbangkan asas *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), dilaksanakan pengujian tentang kohesivitas antara basis pembangunan pemuda dan 15 konstruksi psikologis dengan 1116 partisipan berumur 11 sampai 17 tahun pada daerah Shanghai, Yangzhou, Suzhou dan Changzhou, yang menunjukkan konfirmasi dalam tingkat signifikansi tertentu (Li, He dan Chen, 2021). Pada konteks berbeda, *Healthy Lifestyle Behaviors* (HLBs) merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan asupan sayuran dan buah dengan aktivitas fisik yang berimbang, yang ternyata telah berjalan koheren dengan paradigma PYD melalui promosi fungsi positif, kesehatan dan kesejahteraan di kalangan pemuda Meksiko. Bahwa trajektori antara 5K dalam PYD dan HLBs bahkan terdapat dalam korelasinya dengan permasalahan kesehatan berkenaan obesitas, yang melalui survei *Cross-Sectional* berhasil menunjukkan taraf persamaan secara struktural yang memberikan konfirmasi terhadap reliabilitas serta validitas pengukuran termasuk korelasi asosiatif positif antara konstruksi yang telah dieksplorasi pada model trajektori bahwa HLBs terkait secara signifikan dengan 5K dalam PYD (Domínguez-Espinosa dkk., 2021).

Dalam sejumlah penelitian telah menunjukkan relevansi signifikan antara lima besar kepribadian baik neurotisme, ekstraversi, keterbukaan tentang pengalaman, keramahan dan kesadaran dengan model 5K pada pembangunan pemuda. Orientasi berhati-hati berhubungan signifikan dengan kompetensi, namun hubungan normatif di antara keduanya belum tereksplorasi dalam konstruksi populasi manapun. Bahwa temuan Fagan dkk. (2021) menunjukkan bahwa lima besar karakteristik kepribadian dan 5K dalam PYD secara normatif berbeda dan terdapat konstruksi tersamar yang tidak koheren. Upaya untuk menampilkan krusialitas 5K dalam PYD selama masa muda merupakan upaya yang tidak berusaha merubah karakteristik mapan, namun kualitas hubungan personal dapat ditempa secara positif dalam mempengaruhi pola pembangunan kepemudaan. Bagaimana pun juga, pemahaman yang jauh lebih baik tentang 5K dalam PYD dalam korelasi dengan lima besar karakteristik tentu akan memberikan wawasan yang lebih holistik dan komprehensif

terkait implikasi logis keberadaan PYD pada praktik global. Penerapan model 5K, 6K ataupun 7K dalam pembangunan pemuda di berbagai negara dengan karakteristik berbeda pada semua benua secara holistik akan memperlihatkan bahwa model tersebut dapat melahirkan prospek signifikan untuk menunjang perkembangan pemuda yang bermakna.

Sebagian besar kalangan pemuda di Kabupaten Cianjur memberikan berbagai informasi bahwa terdapat permasalahan kepemudaan di lingkungan sekitar seperti tindak kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang, konsumsi minuman mengandung alkohol, tindakan seks bebas berbahaya termasuk perjudian yang bersifat patologis (Hakim, 2022). Kondisi demikian, secara akurat menunjukkan bahwa permasalahan kepemudaan belum terakomodasi dalam pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan distingtif dari setiap implementor kebijakan. Padahal konsep paling mendasar dari kebijakan kepemudaan tidak lain memperkuat internalisasi resistensi dari kalangan pemuda terhadap perilaku anti sosial dan beresiko dengan melibatkan dalam proses positif. Di Amerika Serikat misalnya, terdapat distribusi dana mencapai jutaan dolar untuk kesehatan mental, sekolah, penegakan hukum dan tenaga medis dalam rangka menangani perilaku antisosial pemuda dalam konteks keluarga, sekolah dan bahkan lingkungan masyarakat (Fisher, 2003). Selama dua dekade terakhir misalnya, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda mengalami lonjakan peningkatan secara massif (Greenwood dkk., 1996), yang pada sisi lain menjadi sasaran dari kekerasan dengan proporsi hampir tiga kali lipat dari taraf proporsi orang dewasa (Sickmund, Snyder dan Poe-Yamagata, 1997), bahkan tidak jarang merupakan pelaku kejahatan terhadap pemuda lain (Snyder dan Sickmund, 1995).

Tidak berbeda jauh dengan pemuda di Kabupaten Cianjur, di Amerika Serikat pemuda juga mempunyai potensi dan probabilitas sangat besar untuk terlibat tindak penyalahgunaan alkohol (Zucker, 2003), pecandu zat nikotin (Biglan dan Severson, 2003), penggunaan obat-obatan terlarang (Benson, Flay dan Foster, 2003), perilaku seks bebas berbahaya (Cantwell dan Rotheram-Borus, 2003) termasuk perjudian di Amerika Utara (Jacobs, 2005). Variabel demografis, perilaku dan psikososial yang berkaitan perjudian misalnya dalam berbagai literatur berhubungan dengan perilaku antisosial, pecandu nikotin serta alkohol, penyalahgunaan obat terlarang, perjudian dalam lingkungan keluarga, kegagalan dalam pendidikan dan permasalahan lainnya (Stinchfield, 2005). Perjudian tersebut, sering terjadi antara kelompok pemuda yang terlibat dalam perilaku berbahaya (Wynne, Smith dan Jacobs, 1996), yang pada hal ekstrim berkorelasi langsung dengan tindakan bunuh diri (Blaszczynski dan Farrell, 1998). Pada umumnya, pemuda yang menjadi penjudi patologis dapat menghadapi efek disforik serta diagnosis klinis depresi dengan tendensi

signifikan berlaku lebih impulsif (Langhinrichsen-Rohling, 2005), karena perjudian patologi akan berkaitan secara koheren dengan penggunaan obat terlarang (Winters dkk., 2005) pada kurun waktu yang panjang.

Berbeda dengan Amerika Serikat yang telah memiliki langkah strategis akurat berbasis ilmu pengetahuan, penanggulangan terkait masalah perilaku pemuda yang antisosial, impulsif bahkan agresif di Kabupaten Cianjur tidak teridentifikasi dalam skema komprehensif baik pengembangan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas pemangku kepentingan, pembangunan infrastruktur dunia usaha maupun perluasan ruang kreasi positif untuk berbagai kalangan pemuda sesuai arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Hakim, 2022). Padahal dalam kajian teori perkembangan anak terbaru bahkan ditegaskan bahwa anak nakal sedari awal menunjukkan *Oppositional Defiant Disorder* pada kali pertama sekolah bahkan memiliki resiko dua sampai tiga kali lipat menjadi pemuda dengan tindakan agresif dan impulsif (Loeber dkk., 1993). Bahwa pemuda dengan tendensi secara signifikan terbiasa dengan perilaku bermasalah, merupakan kelanjutan dari anak-anak dengan karakteristik spesifik *Conduct Disorder* (Webster-Stratton dan Reid, 2011). Dengan demikian, bentuk model penanggulangan perilaku bermasalah seperti *Parent Child Interaction Therapy* (Eyberg dan Bussing, 2011), *Helping the Noncompliant Child* (McMahon, Long dan Forehand, 2011), *Anger Coping Program* dan *Coping Power Program* (Alexander dan Robbins, 2011), *Collaborative Problem Solving* (Greene, 2011) dan *Multisystemic Therapy* (Henggeler, 2012) perlu dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam kebijakan kepemudaan.

Di lain pihak, kalangan pemuda di Kabupaten Cianjur masih memiliki bentuk hubungan dan komunikasi dalam keluarga, tidak menunjukkan indikator penurunan fertilitas bahkan perencanaan abstrak untuk masa mendatang (Hakim, 2022). Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara keluarga dan modal sosial merupakan unit sosial kooperatif paling fundamental. Karena modal sosial memberikan arahan dan batasan terhadap perilaku, sehingga setiap bentuk kemitraan seksual, kelahiran dan pengasuhan anak dalam kurun waktu antargenerasi menjadi cerminan investasi dari modal sosial dalam berbagai masyarakat (Astone dkk., 1999). Konfigurasi keluarga berdasarkan hubungan darah merepresentasikan konstruksi modal sosial yang dapat mengikat sebagai jaringan keluarga yang terhubung secara intensif dengan klaster individualisme yang rendah (Widmer, 2006), karena terdapat jaringan komunikasi informasi, nilai partisipasi termasuk kewajiban dan harapan (Coleman, 1988) yang menjadi sumber daya sebagai fasilitas utama dalam memperoleh keuntungan secara bersama dan personal (Bubolz, 2001). Bahwa jalinan

sosial dalam keluarga menjadi elemen krusial pengembangan modal sosial dalam konstruksi yang lebih kompleks. Terlepas dari hal demikian, Fukuyama (2016) memandang bahwa era disrupsi telah menempatkan keluarga dalam permasalahan penting yang terkait dengan kelahiran, pernikahan, perceraian termasuk secara lebih spesifik berkaitan juga dengan tingkat fertilitas kelompok muda.

Sekalipun jumlah kelompok usia muda dengan rentang usia 0-12 tahun justru mengalami penurunan sedari 24 tahun terakhir, namun tidak mempunyai hubungan dengan tingkat fertilitas pemuda di Kabupaten Cianjur yang bahkan stabil (Hakim, 2022). Beberapa negara maju dari tahun 1980, telah mengalami transisi demografis dengan tingkat kesuburan total mengalami penurunan sampai dibawah tingkat yang dibutuhkan untuk menjaga populasi penduduk dalam interval yang stabil. Sejumlah negara seperti Amerika, Inggris dan Wales, Swedia, Jepang, Spanyol bahkan Italia telah mengalami penurunan tajam dalam konteks kelahiran, sehingga total populasi mengalami penurunan setiap generasi mencapai 30% dibanding generasi terdahulu (Fukuyama, 2016). Setelah beberapa dekade masyarakat dunia berjuang melakukan perlawanan terhadap ledakan populasi global yang muncul dari revolusi perawatan kesehatan pada abad ke-2, dewasa ini masyarakat dunia menghadapi krisis berupa penurunan signifikan angka kelahiran dan angka harapan hidup yang dapat menjadi hambatan kemajuan peradaban manusia (Eberstandt, 2001). Pada tahun 2019, skala populasi dunia mencapai 7,7 Milyar dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri telah melakukan proyeksi populasi akan mencapai 9,7 Milyar dengan pola skenario kesuburan dunia terus menurun dan hanya 8,9 Milyar dengan varian rendah dimana kesuburan akan kembali menurun lebih cepat dibandingkan dengan rentang periode sebelumnya (Leridon, 2020).

Secara faktual, bahwa sebagian besar kalangan pemuda di Kabupaten Cianjur juga masih mempunyai tingkat kepercayaan sebagai kebajikan sosial baik terhadap teman sebaya, orang dewasa, pemimpin masyarakat maupun pemerintahan dewasa ini (Hakim, 2022). Kalangan pemuda masih menunjukkan kecenderungan signifikan untuk memberikan kepercayaan terhadap kerangka kebijakan kepemudaan, formasi implementor kebijakan kepemudaan dan kepentingan dari setiap implementor akan berkorespondensi positif dalam menunjang perkembangan pemuda menjadi pribadi dewasa yang mandiri, penuh potensi dan bertanggung jawab penuh (Hakim, 2022). Berbeda dengan masyarakat Cianjur yang masih terikat dengan kewajiban moralitas fundamental, selama periode tahun 1950-1990-an, masyarakat Amerika dan negara Barat lain dinilai mengalami kegagalan untuk mengakui terdapat perubahan secara massif terkait sistem nilai yang sangat kompleks dengan tema utama individualisme yang meningkat (Fukuyama,

2016). Tidak terlalu mengherankan ketika masyarakat modern menghadirkan berbagai pilihan berdasarkan pertimbangan rasionalitas dari individu, namun konstruksi *ligature* yang mengikat anggota masyarakat secara kuat dan koheren semakin terdegradasi. Masyarakat tradisional, masyarakat agraris atau masyarakat pedesaan dan berbagai terminologi lain yang relevan, memiliki pilihan yang terbatas dalam pernikahan, pekerjaan, kepercayaan dan terikat secara koheren dengan jaringan yang muncul melalui gambaran interventif (Dahrendorf, 1979).

Bahwa fenomena terkait penurunan kepercayaan politis masyarakat Amerika memang telah banyak dikaji dengan memberikan konsentrasi khusus terhadap suatu peristiwa sejarah tertentu dan masalah distingsi dari lembaga pemerintahan (Dalton, 2005), karena perihal demikian didokumentasikan secara holistik (Thomas, 1998). Terlepas dari pernyataan pemimpin dan politisi Amerika yang berkamufase dalam samaran kontinum kesalehan publik (Citrin, 1974), penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintahan terdapat di hampir seluruh negara demokrasi dengan proses industrialisasi. Tendensi signifikan demikian menunjukkan bahwa sebuah kekuatan sosial bersama dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai negara dan tingkatan penurunan kepercayaan terkonsentrasi pada tingkat pendidikan tinggi dengan kelas sosial yang mapan. Data Survei Nasional Amerika menunjukkan penurunan tingkat dukungan secara substansial antara tahun 1964 sampai 1970 (Miller, 1974) bahkan kajian dengan mengembangkan pengukuran deret waktu triwulanan dari tahun 1980 sampai 1997 menunjukkan bahwa penurunan tingkat kepercayaan berkaitan dengan persepsi destruktif terhadap arah penerapan sistem ekonomi dan Kongres (Chanley, Rudolph dan Rahn, 2000).

Selain kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan yang bahkan semakin menurun, kepercayaan individual sebagai produk sampingan dari beragam hubungan kerja sama diantara anggota kelompok masyarakat sebagai warga negara juga berhadapan dengan permasalahan yang serupa. Di Amerika Serikat, kelompok rasial dan etnisitas yang berbeda merepresentasikan kualitas kepercayaan berbeda juga. Masyarakat Amerika keturunan Afrika jauh lebih tidak percaya dibandingkan dengan kelompok lain. 80,9% masyarakat kulit hitam menilai anggota masyarakat lain tidak dapat dipercaya dibandingkan dengan 51,2% orang kulit putih, sementara 60,0% orang kulit hitam menilai orang lain tidak berlaku jujur dibandingkan 31,5% orang kulit putih (Smith, 1997). Kondisi demikian, mengisyaratkan bahwa kualitas kepercayaan merupakan fenomena spesifik dalam perspektif generasi '*baby boom*', karena peningkatan ketidakpercayaan terhadap pihak lain di antara kelompok muda yang terlahir selama periode tahun

1958 sampai 1972. Bahwa penerus dari generasi tersebut mempunyai kepercayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan kualitas kepercayaan orang tua mereka sendiri (Rahn dan Transue, 1998), sehingga kualitas perlintasan kepercayaan semakin terdegradasi selama transisi antar generasi.

Dengan mempertimbangkan tidak terdapat *conjunctures* yang mencerminkan hubungan interaksi konstruktif dari setiap implementor kebijakan karena terdorong oleh perubahan lingkungan strategis melalui representasi akumulasi bukti empirik, kebuntuan kebijakan dan guncangan eksternal (Hakim, 2022), maka permasalahan skema implementasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur tersebut di masa mendatang akan semakin kompleks untuk diantisipasi terutama pada titik kulminasi bonus demografis. Sekalipun kalangan pemuda memiliki persepsi yang konstruktif baik terhadap kerangka kebijakan, formasi implementor maupun kepentingan setiap implementor dalam korelasi dengan perkembangan pemuda, namun perihai tersebut tidak akan menjadi diskursu penunjang peningkatan kinerja implementasi berbagai pelayanan kepemudaan selama tidak terdapat perkembangan kelembagaan sebagai perubahan dalam konteks transformasi dari kebijakan kepemudaan. Oleh karena itu, sebagai bentuk kebaruan penelitian akan dilakukan penelitian untuk memberikan pemetaan holistik tentang perilaku kalangan pemuda yang menjadi salah satu dasar dari transformasi kebijakan kepemudaan di masa depan. Karena ketika konteks dari kebijakan telah dikonstruksikan sebagai stimulus perilaku kooperatif, maka pemuda akan memiliki kecenderungan memberikan responsivitas yang konstruktif (Hakim, Darmawan dan Anggraeni, 2022), sehingga sintesis pendekatan behavioral menjadi langkah krusial dalam tahapan kebijakan (Gopalan dan Pirog, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder sebagai tindaklanjut lebih operasional dari hasil penelitian survei pemuda di Kabupaten Cianjur dengan batas toleransi kesalahan sekitar 7,19%. Bahwa data sekunder yang diperoleh dari *database* yang telah tersedia (Dukeshire dan Rhurlow, 2002) misalnya berbagai dokumen yang tidak pernah dipublikasikan, buku, artikel, jurnal, laporan penelitian dan informasi dari media (Sugiyono, 2017) tersebut dalam penelitian ini diformulasikan sebagai konstruksi dasar pemecahan berbagai masalah terkait dengan pembangunan pemuda yang ditemukan pada survei. Adapun tahapan dari penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, menjalankan identifikasi terhadap item tertentu sebagai konstruksi dasar masalah kebijakan kepemudaan dalam perspektif behaviorisme. *Kedua*, melakukan penelusuran terhadap berbagai informasi terbaru dan relevan dengan permasalahan penelitian

dari sejumlah sumber dengan seksama mempertimbangkan kualifikasi tertentu seperti signifikansi, representasi, otentisitas dan kredibilitas (Payne dan Payne, 2004). *Ketiga*, mengadakan proses seleksi ketat terhadap informasi yang telah diperoleh dari sumber kredibel baik nasional maupun internasional sebagai pemilihan varietas yang berkaitan dengan subsistem berbagai informasi krusial. *Keempat*, melakukan penyelidikan terhadap signifikansi masalah penelitian secara mendalam dengan bertumpu pada kajian literatur kredibel terbaru untuk memproyeksikan dasar-dasar behavioral yang dibutuhkan dalam menunjang transformasi kebijakan kepemudaan di masa mendatang.

3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pendekatan behaviorisme bahwa tingkat keberhasilan dari kebijakan publik secara kulminatif akan ditentukan oleh taraf responsivitas kelompok sasaran (Putra dan Sanusi, 2019), sehingga pemetaan konstruksi dasar behavioral berkaitan transformasi pelayanan kepemudaan dapat dilakukan melalui penyelidikan holistik terhadap mekanisme perubahan perilaku sebagai responsivitas yang ditentukan oleh stimulus. Keberadaan perasaan diskriminasi dan prasangka implisit misalnya secara aktual dapat mempengaruhi konfigurasi ruang implikasi dari kebijakan (Hardin dan Banaji, 2013), sehingga merupakan bagian yang terintegrasi dari perilaku kelompok sasaran yang dapat direduksi melalui perubahan rasional. Distorsi dalam hubungan antara kelompok dengan diferensiasi rasial terbuka yang tidak terakomodasi dalam kerangka kebijakan konvensional, juga dapat memberikan pengaruh terhadap ruang interaksi antara kelompok (Shelton, Richeson dan Dovidio, 2013) karena memang tidak dirancang secara spesifik untuk merespons diferensiasi tersebut. Pada sisi lain, pemangku kepentingan sekalipun menunjukkan berbagai dukungan terkait kesamaan kesempatan, namun keberadaan distorsi dalam konteks gender bahkan menghalangi penguasaan informasi kebijakan secara holistik (Fiske dan Krieger, 2013). Dengan demikian, kerangka kebijakan harus akurat mencerminkan stimulus tertentu seperti kepercayaan, keadilan prosedural, identitas sosial kultural, motivasi dan kebutuhan yang secara mendasar dalam setting sosial menjadi mekanisme perubahan perilaku. Karena dengan motif perilaku konstruktif tersebut, berbagai pemangku kepentingan akan memperoleh data penyelidikan berkaitan perilaku (Tyler, 2013).

Paradigma kontingensi yang dikembangkan Skinner merupakan unit analisis yang memberikan penekanan bahwa perihai yang ditentukan dalam interaksi sosial tidak merepresentasikan tindakan kelompok, melainkan tindakan individualitas dan fragmentatif sebagai titik bifurkasi yang berhimpun pada kondisi kelompok dalam membentuk tindakan yang saling terhubung. Oleh karena itu, paradigma

demikian menghadirkan alternatif dalam konteks perdebatan teoritik terkait kerangka terbaik dalam menjalankan penyelidikan signifikansi dan implikasi dari tindakan interaksi sosial berbasiskan diferensiasi stimulus, responsivitas operan dan penguatan. Tidak terlalu mengejutkan terdapat kalangan ahli behavioral yang menunjukkan dukungan terkait pendekatan relasional dalam mendalami perilaku secara menyeluruh sebagai dimensi konsepsional dari filosofi Ernest Mach terutama dalam konteks paradigma Skinner dan hubungan fungsional Mach. Dengan demikian, tindakan dalam konteks fenomena sosial dan politik, hanya dimungkinkan dieksplorasi melalui pertanyaan mendasar bagaimana tindakan dilahirkan dari konstruksi konkrit relasional tertentu. Karena bagaimanapun tindakan dengan kompleksitas tinggi hanya dapat dijalankan penyelidikan melalui kekuatan motivasi yang terbentuk melalui internalisasi, nilai karakteristik, diferensiasi stimulus, mekanisme tentang perubahan kepribadian dan proyeksi potensi kognitif sebagai konstruksi hipotesis.

Dalam perspektif behaviorisme teleologis bahwa teori identitas menekankan pikiran tidak menjadi peristiwa internal yang terfragmentasi, melainkan konstruksi tindakan yang dapat diboservasi orang lain secara nyata (Rachlin, 2021), sehingga keberadaan pikiran merupakan anteseden spesifik dari tindakan yang cukup efisien. Sejumlah kalangan memberikan konsentrasi terhadap konteks sentral dari evolusi historikal sebagai konsolidasi lingkungan dan perilaku (Carrara, 2018) untuk dapat mencapai taraf signifikansi penjelasan kontemporer perilaku dan logika behavioral melalui tindakan operan molar, tampilan operan termasuk fenomena dari psikologis yang menjadi cerminan pola molar dari perilaku terbuka (Lazzeri, 2021). Tindakan operan dari behaviorisme teleologis sendiri akan membangun fenomena psikologis yang tidak terkonsentrasi pada stimulus interoseptif-proprioseptif dan tindakan dari operan terkoneksi, karena fenomena demikian akan mempunyai tendensi signifikan menempatkan tindakan sebagai konteks substansial independen dan inheren dalam pengalaman dan fungsi sosial sebagai gagasan yang menjadi derivasi dari tindakan. Konstruksi paling dasar dari transformasi pelayanan kepemudaan dalam perspektif behaviorisme teleologis akan bergantung pada skema implementasi kebijakan yang khusus didesain memberikan respon terhadap proses kognisi seperti pengembangan kerangka pikiran dan pengaturan diri yang dinilai sebagai samaran kontinum prima dari tindakan sendiri.

Dalam konteks demikian, keberhasilan pembangunan pemuda secara holistik akan bergantung pada bagaimana kebijakan kepemudaan mengakomodasi perilaku pemuda yang dapat diamati secara lahiriah. Bahwa formasi kebijakan kepemudaan harus memberikan kalkulasi terhadap proses kognisi, seperti pengaturan emosional dan

pengembangan konstruksi berpikir yang dinilai sebagai samaran kontinum dari perilaku itu sendiri. Karena TEB memiliki karakteristik distingsi dari behaviorisme lain dengan konsentrasi pada konsep kehendak bebas, maka kebijakan kepemudaan harus memuat regulasi pengendalian diri. Bagaimana seorang pemuda menunjukkan perilaku dan relasi sosial dengan keluarga, teman sebaya dan masyarakat akan terus berkaitan dengan pengendalian diri. Bahwa salah satu bagian terpenting dalam pola pembangunan pemuda yang konstruktif adalah bagaimana memberikan rangkaian aturan berkaitan hubungan antar perilaku, pengalaman dan emosional secara adaptif sebagai bagian dari perilaku itu sendiri secara holistik. Seorang pemuda harus dapat mencapai kualitas keterampilan untuk melakukan fase penyesuaian dan pengaturan emosi, yang memungkinkan terjadi respons yang mendorong berbagai pengalaman sosial yang realistik (Wang dkk., 2015).

Sebagai representasi holistik transformasi berbasis pendekatan behaviorisme teleologis, maka kebijakan kepemudaan yang lebih moderat dapat memuat program *Healthy Living* yang ditujukan untuk dapat membantu kalangan pemuda menjalani kehidupan dengan memperhatikan titik keseimbangan antara kesehatan mentalitas, emosionalitas dan fisik. Program hidup sehat berusaha memberdayakan kalangan pemuda untuk menjadi entitas yang sehat secara mental dan fisik, dengan bentuk keterampilan membentuk keputusan yang sehat dan menjalani kehidupan yang juga sehat. Kalangan pemuda didorong secara seksama dalam memiliki kepercayaan diri serta keterampilan menjalani kehidupan secara sehat, tidak hanya dengan berusaha meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, namun pemuda dihadapkan secara langsung dengan kondisi yang memungkinkan mengatasi tantangan kehidupan dan menjadi pemimpin dalam karir serta komunitas ketika tumbuh menjadi entitas yang dewasa dengan tanggung jawab sosial. Program hidup sehat menekankan kesehatan pikiran dengan *social and emotional well-being* melalui pengajaran tentang pilihan yang dapat membantu diri sendiri, keluarga dan komunitas. Dengan program yang memperhatikan isu penyalahgunaan obat terlarang dan kesehatan mental, organisasi 4-H membantu keterampilan interpersonal dan pengambilan keputusan yang cukup proporsional. Contoh relevan program *Healthy Living* sebagai *social and emotional well-being* yang dikembangkan Organisasi 4-H seperti *Summit for Healthy Living*, *4-H Healthy Futures* dan *Health Rocks!*[®].

Phylogenetically Important Events (PIEs) merupakan konsep terkait tindakan yang bertumpu pada kovarians, induksi dan alokasi sebagai cerminan behaviorisme molar terkait tindakan (Baum, 2021). Penilaian Skinner berkenaan tindakan sebagai representasi molekular dengan diametral terbuka

dengan behaviorisme molar tidak memperlihatkan ruang diferensiasi ketika model Skinnerian dipergunakan langsung sebagai dasar penjelasan tindakan (Laurenti, 2021). Oleh karena itu, behaviorisme molar dari Baum dan Rachlin memandang tindakan tidak mungkin dipahami secara holistik dengan menghadirkan perhatian spesifik terhadap momentum dan peristiwa tertentu. Bahwa tindakan bagaimanapun juga dapat dipahami melalui hubungannya dengan tindakan lain dalam trajektori historis tertentu yang memang relatif abstrak untuk mendalami kompleksitas perilaku secara utuh. Konstruksi perilaku molekuler standar misalnya keberadaan relasi asosiatif dalam pandangan behaviorisme molar merupakan proksimal fiktif yang terbatas menjalankan substitusi terhadap variabel tindakan molar seperti keberadaan penguatan dari tindakan. Karena tindakan dalam perspektif behaviorisme molar diposisikan sebagai konstruksi koheren yang bahkan dapat dikondisikan selama terkoneksi dengan berbagai tindakan variatif lain dalam trajektori tertentu, maka transformasi dari pelayanan kepemudaan harus memenuhi taraf keseimbangan antara tindakan dan pilihan rasional melalui pelayanan variatif dan tertintegrasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan.

Prinsip behaviorisme molar bahwa perilaku membutuhkan waktu tidak hanya mengarah pada gagasan terkait durasi responsivitas, melainkan terhadap kebutuhan dalam mengidentifikasi perilaku yang mengharuskan terdapat alokasi waktu cukup proporsional. Tanggapan sesaat dalam behaviorisme molekuler merupakan kualitas kesimpulan yang diperluas dalam retrospeksi, sehingga hanya merupakan abstraksi yang jauh berbeda dengan kegiatan yang diperluas sebagai entitas perilaku realistik dan nyata. Berdasarkan prinsip tersebut, kebijakan kepemudaan bukan merupakan kebijakan dengan karakteristik seasonal, melainkan senantiasa berkelanjutan meski sering ditampilkan dalam samaran kontinum beberapa sesi tertentu. *Positive Youth Development* yang berbasis studi longitudinal 4-H telah mengembangkan kerangka konseptual sebagai strategi untuk mendukung pembangunan pemuda dengan ranah penekanan terhadap hubungan konstruktif berkelanjutan antara pemuda dan orang dewasa, kegiatan yang membangun keterampilan krusial dalam kehidupan, bahkan memberikan kesempatan luas pada kalangan pemuda untuk dapat mempergunakan keterampilan tersebut dalam kegiatan kemasyarakatan baik sebagai peserta maupun pemimpin yang mengatur langsung kegiatan tersebut.

Dalam perspektif evolusioner, bahwa pandangan molar tampaknya berupaya menghubungkan peran sekunder dengan perilaku dibandingkan teori evolusi yang tidak terkonsentrasi pada perilaku yang memiliki peran lebih relevan dalam evolusi. Ketika integrasi antara behaviorisme molar dan struktur analisis perilaku multilevel

berdasarkan pada teori evolusi yang berpusat pada gen, maka analisis perilaku tetap berada dalam permukaan ilmu biologi lainnya. Sekalipun demikian, realitas bahwa behaviorisme teoritis telah mengalami perubahan krusial dari behaviorisme radikal menjadi kenyataan yang tidak dapat disanggah. Untuk stimulus dan respons, konsep behaviorisme teoritis memberikan gagasan baru tentang keadaan konseptual, bukan fisiologis organisme yang membangun signifikansi repertoar respons yang tersedia dalam konteks stimulus yang diberikan. Keadaan demikian, melakukan identifikasi terkait korelasi antara fitur lingkungan dengan entitas yang bernilai seseorang, yang menginduksi repertoar dari mana repetisi operan akan ditentukan (Staddon, 2021). Bahwa kontingensi respons mungkin tidak diperlukan dan terlihat sebagai tampilan refleksi, karena pilihan perilaku dan motivasi dalam konteks tertentu akan terbatas.

Bahwa behavioris molar seperti Rachlin dan Baum menilai perilaku tidak lagi dapat dipahami dengan memberikan konsentrasi khusus pada suatu peristiwa dalam momen tertentu, karena perilaku dalam dipahami dengan akurat dalam korelasinya dengan perilaku dalam sejarah yang semakin abstrak untuk mengakomodasi tingkat kompleksitas yang konkrit. Behavioris molar memiliki pendapat bahwa konstruksi molekuler standar seperti kekuatan asosiasi menjadi penyebab proksimal fiktif yang hanya menggantikan variabel molar, seperti akselerasi penguatan terhadap perilaku. Karena paradigma behaviorisme molar menempatkan perilaku sebagai hal koheren yang dapat diperpanjang dan meliputi berbagai aktivitas variatif, maka kinerja dari implementasi kebijakan kepemudaan harus menjadikan keterlibatan pemuda dalam kebijakan sebagai suatu perilaku pilihan rasional yang membutuhkan alokasi waktu tertentu. Keseimbangan diantara pilihan dan perilaku dapat terjadi karena kebijakan kepemudaan telah menghadirkan lebih dari satu aktivitas alternatif. Oleh karena itu, sebagai representasi transformasi berbasis behaviorisme molar bahwa kerangka kebijakan dapat memuat program area misalnya *Science, Technology, Engineering and Math (STEM)* termasuk program *Animal and Agricultural Science Curriculum* dari Organisasi 4-H dalam mengembangkan keterampilan hidup.

Menurut pandangan behaviorisme teoritis bahwa *classical conditioning* yang menekankan kompleksitas tindakan dapat dipahami melalui hubungan stimulus dan responsivitas sebagai konfigurasi dari reflek natural, yang relevan dengan *operant conditioning* sebagai *reinforcement* yang dapat dikorelasikan dengan responsivitas itu sendiri. Dengan demikian, tidak mungkin mudah untuk memberikan persetujuan terhadap proposisi bahwa behaviorisme teoritis bukan sebagai mentalisme empirik, sekalipun instrumen behaviorisme teoritis memberikan legitimasi terkait perluasan domain teori

(Lopes, 2021). Berdasarkan pandangan behaviorisme teoritis Staddon, konstruksi dasar dari transformasi pelayanan kepemudaan harus memuat kualifikasi *positive reinforcement* sebagai upaya berkelanjutan membangun perilaku prososial yang konstruktif. Hal demikian berangkat dari behaviorisme teoritis Staddon yang merupakan simbol batasan penjelasan dan penyelidikan holistik terhadap fenomena psikologi yang dimunculkan secara normatif dari empirisme naif sebagai metafisika transenden dan atheoritis, sehingga menjadikan proposisi Staddon menyerupai dari disirata epistemologi kontemporer. Ketika konteks *positive reinforcement* demikian diterapkan untuk menghadirkan berbagai fasilitas terhadap tindakan tertentu, maka keterlibatan dalam kebijakan dapat diproyeksikan secara lebih utuh, sekalipun taraf keinginan keterlibatan tidak terlalu realistik. Dengan demikian, tanggungjawab dari implementor kebijakan dalam membangun skema implementasi berbasis wawasan behaviorial akan membuka probabilitas dalam mengharapkan efek yang diharapkan.

Miller dan Prentice (2013) berkaitan latar belakang psikologis dalam konteks perubahan kerangka tindakan akan terkonsentrasi pada keinginan implementor dari kebijakan dalam merubah tindakan kelompok sasaran yang sesuai dengan berbagai kepentingan jangka panjang melalui proses intervensi sebagai konstruksi psikologi. Bahwa bentuk program, sosialisasi visibilitas dan aksesibilitas terhadap pelayanan tidak lebih dari faktor eksternal yang dipandang cenderung berkontribusi berkaitan keterlibatan dalam kebijakan dengan proses pendidikan dan peningkatan kesadaran yang terikat koheren dengan persepsi tidak mungkin menjadi solusi tunggal. Dalam konteks demikian, berbagai informasi yang diilustrasikan secara behaviorial bahkan dapat dipergunakan oleh berbagai pihak dalam membangun agenda bersama untuk menghadirkan perubahan nyata misalnya pada bidang kesehatan (Wansink, 2013) dapat menjadi dasar *Classical Conditioning*. Garcia dan Cohen (2013) menjalankan penyelidikan terkait dengan intervensi psikologis yang terkonsentrasi pada masalah ancaman identitas, yang telah terbukti dapat menghapus kesenjangan dalam proses pencapaian prestasi. Jantung analisis dari analogi tersebut bahwa kebijakan sendiri tidak lain menjadi sistem dengan berbagai faktor baik psikologis maupun struktural saling terkoneksi sebagai lingkungan terintegrasi yang membangun orientasi sikap, perilaku dan kinerja. Oleh karena itu, *Classical Conditioning* sebagai intervensi dari psikologi dapat berpengaruh pada tindakan dalam taraf signifikansi tertentu.

Berbagai penelitian behaviorial misalnya dalam bidang ekonomi dan keuangan telah melakukan penyelidikan terkait prosedur sistematis dengan preferensi konkret masyarakat berada dalam ruang bangun yang ambivalen dengan asumsi dasar pada teori klasik pilihan tindakan. Benartzi, Peleg dan

Thaler (2013) dalam konteks yang terkait rencana tabungan pensiun menunjukkan detail kecil dalam kerangka rencana pensiun bahkan dapat memberikan implikasi dramatis terhadap keputusan investasi dan tingkat tabungan. Keputusan inersia, kerugian termasuk sinkronisasi tabungan menjadi arsitektur rencana masa depan yang memiliki probabilitas membantu untuk menentukan pilihan terbaik, yang tidak mungkin terlepas dari mekanisme hubungan ketenagakerjaan sebagai relasi paling krusial dalam perspektif ekonomi behaviorial (Jolls, 2013). Dalam konteks ekonomi dan keuangan yang berbeda, bahwa masalah kemiskinan menjadi konteks yang melahirkan tantangan distingtif dalam psikologis seseorang melalui respons tertentu, sehingga dapat memberikan implikasi terhadap fungsi kinerja, konsentrasi konstan bahkan masalah lain (Mullainathan dan Shafir, 2013). Bahwa analogi tersebut mencerminkan bahwa behaviorisme teleologis yang menekankan pengembangan pikiran dan pengaturan diri dalam kerangka kebijakan sebagai dasar kebaruan di masa mendatang harus terkonsentrasi pada pelayanan kepemudaan dengan berbasis program yang dapat mendorong stabilitas psikis yang dibutuhkan dalam membangun kehidupan pemuda yang lebih bermakna.

Johnson dan Goldstein (2013) telah menempatkan keputusan dengan konteks *default* sebagai opsi yang ditujukan secara spesifik terhadap masyarakat yang tidak dapat membentuk keputusan aktif dengan memindahkan dari ruang strategi tertutup menuju mekanisme kebijakan yang mempengaruhi perilaku. Perubahan dari *default* akan menjadi pendekatan yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan proses sosialisasi persuasif yang didesain secara spesifik dalam mempengaruhi tindakan kelompok sasaran dalam membuat keputusan tertentu. Dengan mempertimbangkan faktualitas setiap *default* akan mempunyai taraf signifikansi melalui pemetaan arah probabilitas dan efektivitas, seluruh implementor kebijakan dapat mempergunakan *default* sebagai *positive reinforcement* dalam meningkatkan keterlibatan kelompok sasaran dalam kebijakan. Menempatkan *default* sebagai pengkondisian alamiah dari tindakan menjadi lingkungan keputusan yang dibangun dengan menentukan *default* sendiri, proyeksi signifikansi kekeliruan, timbal balik konstruktif, mengatur pilihan dengan kompleksitas tinggi dan menghadirkan intensif (Thaler, Sunstein dan Balz, 2013). Terlebih lagi, penerapan informasi dasar behaviorial bahkan analisis regulasi terhadap informasi tersebut telah memberikan peningkatan pemahaman dari setiap pemangku kebijakan terkait alokasi sumber daya keuangan dan signifikansi khusus dari kebijakan (Barr, Mullainathan dan Shafir, 2013) melalui berbagai isu spesifik (Lichtenberg, 2013) yang telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti kebijakan ekonomi

(Congdon, 2013) dan kebijakan kesehatan (Redelmeier, 2013).

Konstruksi dasar transformasi kebijakan kepemudaan berbasis behaviorisme, tidak hanya berangkat dari faktualitas tindakan terkoneksi dengan tindakan variatif lain dalam situasi tertentu, melainkan juga terkait dengan alat bantu keputusan yang meningkatkan keputusan preferensi sensitif karena implementor bahkan tidak akan pernah berhasil ketika bergerak sendiri. Ubel (2013) berpandangan terdapat asumsi umum ketika implementor kebijakan mempunyai kebebasan memilih, maka dengan otomatis akan menurunkan probabilitas pertentangan karena keputusan yang secara akurat telah dipilih akan holistik mencerminkan preferensi. Implementor kebijakan kepemudaan tidak hanya dapat mengandalkan pemahaman kebutuhan pemuda pada masa transisi adolesens yang penuh gejolak, menimbang kalangan pemuda sendiri yang memahami program yang dibutuhkan tidak menjadi jaminan dalam mencapai tingkat perkembangan yang diharapkan. Oleh karena itu, berbagai fenomena khusus yang dinilai sebagai representasi kekeliruan seperti *status quo*, distorsi *default*, taraf optimisme yang berlebihan dan pertimbangan probabilitas nonlinier (Loewenstein, John dan Volpp, 2013) dapat dipergunakan dalam membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena tidak mungkin membiarkan pemuda berjalan sendiri, maka setiap implementor kebijakan dapat mulai bercermin dari berbagai kesalahan untuk menunjang perkembangan melalui berbagai pilihan.

Sebagai representasi dari transformasi berbasiskan pendekatan behaviorisme teoritis, maka kebijakan kebijakan dengan mempergunakan *default* sebagai *positive reinforcement* dalam meningkatkan keterlibatan kelompok sasaran dalam berbagai pelayanan dapat mengadopsikan kondisi *default* dalam dua kasus berikut. *Pertama*, konsep distortif dalam peraturan perundang-undangan *No Child Left Behind Act* Tahun 2001 mengharuskan siswa sekolah menengah di Amerika memberikan data seperti nomor telepon, alamat dan nama pada lembaga rekrutmen militer terkecuali kalangan orang tua menunjukkan keberatan terhadap sekolah. Karakteristik *opt-out* (orang tua yang belum menolak memberikan informasi) dari persetujuan demikian secara eksplisit terdapat dalam peraturan tersebut, hanya sebagian wilayah terbuka memberikan penolakan sebagai respons terhadap kebijakan *Don't Ask Don't Tell*. Sekalipun dinilai cukup efektif, namun secara faktual pengaturan *opt-out* demikian ternyata mengundang kontroversial. Karena pada sebagian besar wilayah, formulir pemberian izin tidak dikembalikan yang mempunyai pengertian sama dengan telah memberikan perizinan, terlebih hanya sedikit orang tua yang secara eksplisit sangat keberatan dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, Fairport, sebuah wilayah di Rochester, New York, memutuskan untuk melakukan perubahan

mendasar atas *default* kebijakan menjadi *opt-in* (mereka direkrut hanya yang telah secara eksplisit memberikan izin), sehingga hanya 5% yang secara eksplisit memberikan izin.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan seksual di sejumlah sekolah di Amerika menjadi permasalahan kontroversial, sehingga banyak pemerintah di negara bagian telah membentuk pengaturan *opt-out* berkaitan keterlibatan siswa dalam pendidikan tersebut. Sejumlah negara bagian terutama Kansas, telah melaksanakan perubahan besar terhadap *default* kebijakan setelah melalui kasus kontroversial bahkan melalui ti-vote sebagai representasi dari kelompok menyeluruh dari pemilih yang memang tidak terbatas pada konteks individualisme. Pemangku kepentingan pendidikan di negara bagian tersebut termasuk Utah, Nevada dan Arizona telah memperlihatkan persyaratan persetujuan secara eksplisit terkait keterlibatan siswa dalam pendidikan seks tersebut. Dengan demikian, pengaturan *opt-in* dan *opt-out* pada kebijakan akan mempengaruhi tingkatan keterlibatan kalangan pemuda sebagai kelompok sasaran dalam pelayanan kepemudaan dengan mempertimbangkan juga aspek signifikansi, dukungan implisit dan usaha. Pemangku kepentingan terkait pembangunan pemuda dan kalangan yang terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan, harus melakukan pengelolaan seksama terhadap *default* kebijakan dengan intervensi potensial dapat diperkenankan secara empirik melalui mekanisme hubungan kausalitas dari *default* tersebut. Misalnya pada konteks keterbatasan cakupan dari pelayanan kepemudaan dengan implikasi *default* kebijakan berkaitan dengan upaya, maka peningkatan dari cakupan menjadi langkah logis melalui *default* relevan dengan dugaan terbalik.

Sintesis pendekatan biologis dinilai dapat menghadirkan penjelasan tentang keterkaitan kerangka mediasi dan fungsional dengan pengalaman yang dapat secara utuh merubah tindakan dalam konteks lingkungan tertentu. Sintesis demikian dapat membangun penguatan dalam menunjang proposisi bahwa *conditioning* dasar yang relevan dipergunakan pada konteks kontingensi operan dan responsivitas, implikasi yang berbeda muncul karena diferensiasi tindakan dan lingkungan dimunculkan ke dalam tahapan penguatan (Donahoe, 2021). Sekalipun behaviorisme biologis dapat mengupayakan arah kombinasi berbagai perihal terkait perilaku dalam pendekatan inklusif melalui *Classical Conditioning* sebagai pendekatan konvensional, namun tindakan tetap terkonsentrasi terhadap keterbatasan dalam manipulasi dalam perihal penanganannya (Timberlake, 2007), sehingga mengisyaratkan terdapat perubahan mendasar dari dimensi diferensiasi diantara pilar dalam tradisi analisis perilaku (de Carvalho Neto, 2021). Dalam pendekatan behaviorisme biologis bahwa konstruksi dasar dari transformasi pelayanan kepemudaan harus merepresentasikan kombinasi antara tindakan serta

hubungan fungsional tertentu dalam konteks lingkungan yang relevan. Lingkungan secara alami akan mendorong perubahan disposisi perspektif, tindakan dan keterampilan tertentu yang secara normatif akan dimungkinkan terjadi *conditioning*, terlebih lagi keberadaan variabel tindakan yang dikondisikan bahkan dapat dipergunakan sebagai penjelasan terhadap perilaku yang muncul.

Seorang pemuda akan mendapatkan pelajaran untuk menghindari atraktor dari perilaku bermasalah, ketika kebijakan layanan kepemudaan memungkinkan dalam memberikan pengalaman sebagai pembelajaran dengan seperangkat asosiasi antara stimulus dan respons. Karena behaviorisme biologis merupakan behaviorisme yang berangkat dari behaviorisme radikal Skinner dan mempelajari perilaku melalui pola *Operant Conditioning* dengan memperhitungkan adanya kontak eksplorasi, secara normatif kinerja implementasi kebijakan kepemudaan akan bergantung pada sejauh mana pemuda melaksanakan pengkondisian perkembangan secara realistis relevan dengan lingkungan. Bahwa aset eksternal berupa lingkungan, ternyata mempunyai hubungan positif dengan perilaku pemuda (Kosic, Wium dan Dimitrova, 2021). Dua studi di Turki dengan mempergunakan pendekatan berbasis aset pembentukan identitas untuk melaksanakan pengujian terhadap asumsi bahwa lingkungan sosial eksternal dan individual menjadi aset perkembangan yang cukup signifikan tentang status identitas serta rasa percaya diri yang positif. Temuan krusial dari kedua studi tersebut, menunjukkan jalur langsung dan tidak langsung diantara aset pembangunan dengan pola status dan dimensi identitas (Dost-Gözkän dan Wium, 2021).

Dalam konteks behaviorisme biologis, pembangunan kepemudaan tidak akan secara langsung dihasilkan oleh layanan kepemudaan sebagai stimulus, namun akan berimplikasi kuat terhadap perubahan pada kondisi di kalangan pemuda yang telah terinternalisasi. Bahwa pemuda sendiri dengan berbagai pengalaman serta aktivitas realistis yang akan menghasilkan perubahan mendasar yang memungkinkan untuk memberikan reaksi terhadap realitas dengan metode tertentu sebagai bagian proses pembangunan kepemudaan yang holistik. Behaviorisme biologis menjadi landasan akurat untuk menjadikan kebijakan kepemudaan sebagai sarana pembelajaran yang menjadi implikasi dari pembangunan kepemudaan. Setiap bentuk program layanan kepemudaan membutuhkan pembelajaran pada tingkat perilaku pemuda untuk lebih mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam memahami realitas. Sebagai contoh, ketika seorang pemuda tidak memiliki persepsi terkait perilaku bermasalah, maka pemuda dapat tertarik dalam region magnetik dari perilaku bermasalah seperti penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Tentu dengan memiliki persepsi terkait perilaku bermasalah, dalam titik titik tertentu tidak

menghalangi kalangan pemuda untuk terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang.

Dalam perspektif behaviorisme biologis, kebijakan kepemudaan harus cermat mempersiapkan serta menyediakan lingkungan relevan sebagai konteks fungsional, yang menjadi tempat kalangan pemuda dalam berkembang. Lingkungan kebijakan harus memiliki struktur dan karakteristik yang memungkinkan pembelajaran dalam mengembangkan kompetensi, karakteristik, kepercayaan diri, kepedulian terhadap sesama dan kontribusi terhadap masyarakat sebagai modifikasi perilaku yang tentu diharapkan. Kebijakan kepemudaan harus memberikan pengalaman dan rangkaian aktivitas pemuda sebagai ranah modifikasi respons terhadap lingkungan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, komunitas maupun masyarakat dengan segala bentuk perubahan preferensi dan persepsi terhadap kebijakan kepemudaan yang disediakan implementor kebijakan. Kebijakan kepemudaan dapat menempatkan pemuda pada situasi untuk belajar terhadap pengalaman yang memungkinkan perkembangan dan perubahan perilaku, sekalipun kebijakan kepemudaan demikian akan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap pemuda. Relevan dengan perspektif behaviorisme molar bahwa representasi kebijakan kepemudaan harus variatif, namun secara terintegrasi berfungsi sebagai lingkungan perkembangan yang konstruktif seperti *After-School program* (Deutsch, 2017), program komunitas sehat (Nakkula dkk., 2010) termasuk program mobilisasi orang dari dewasa (Gil Clary dan Rhodes, 2006).

Sementara behaviorisme intensional bertumpu pada filosofi psikologis dalam memberikan penyelidikan terhadap penjelasan kognisi tindakan, yang secara logis mengilustrasikan keberadaan ekstensionalitas sebagai ruang lingkup tindakan. Oleh karena itu, behaviorisme intensional menerapkan pengujian model perilaku dengan berbasis ekstensional, interpretasi kognitif serta interpretasi yang disengaja (Foxall, 2021) yang terkonsentrasi pada tindakan sebagai konfigurasi disengaja atau respons alamiah. Sebagian kalangan menilai tindakan merupakan kausalitas rasional secara *Top-Down* dari keberadaan intensionalitas, sementara kalangan lain justru menilai tindakan menjadi cerminan dari responsivitas yang tidak disengaja, sekalipun kedua alternatif tersebut tidak akan memuaskan (Mazzone dan Campisi, 2013). Keyakinan tidak dapat merepresentasikan karakteristik relevan dengan keinginan, yang bahkan berbeda dalam perspektif persepsi dan emosi sebagai realitas yang terabaikan dalam dalam behaviorisme intensional (Oliveira-Castro, 2021). Dalam perspektif distingsi behaviorisme intensional konstruksi dasar dari transformasi pelayanan kepemudaan harus memposisikan prosedural sebagai stimulus tindakan yang terkoneksi dengan keterlibatan pada kebijakan sebagai respons alami melalui trajektori

intensionalitas seperti motivasi, kebutuhan, identitas sosial kultural, keadilan bahkan kepercayaan, yang akan menjadi prediktor dan akselerator dari tindakan.

Gagasan behaviorisme intensional bukan merupakan perihalan yang relatif baru, karena dapat ditemukan dalam literatur tentang interaksi antara agen dengan fokus terhadap fakta bahwa niat lebih baik dipahami sebagai entitas yang berada beririsan dengan rutinitas sosial dibandingkan pada pikiran seseorang. Oleh karena itu, dalam perspektif behaviorisme intensional bahwa kinerja implementasi kebijakan layanan kepemudaan akan bergantung pada kualitas intensionalitas kalangan pemuda terkait program kebijakan. Seperti halnya seorang fenomenolog yang mempercayai bahwa dibalik perilaku tertentu terdapat intensionalitas sebagai konfigurasi nilai yang akan dicapai secara seksama. Kebijakan kepemudaan harus memuat sejumlah nilai yang krusial untuk pemuda berupa jejaring sosial tertentu yang menunjang pembangunan pemuda secara komprehensif. Misalnya, kebijakan kepemudaan dapat memberikan penawaran berkenaan sejumlah nilai yang dapat diperoleh kalangan pemuda ketika terlibat secara langsung dalam *Entrepreneurship Programs* sebagai kebijakan lintas sektoral. Dengan *Social Entrepreneurship*, pemuda dapat menghadirkan perubahan sosial dengan turut terlibat mengatasi berbagai permasalahan sosial ataupun dengan *Political Entrepreneurship* pemuda bahkan berusaha membangun *Start-Up* politik yang inovatif sebagai upaya terukur menghadirkan berbagai perubahan politik yang transformatif.

Bahwa behaviorisme sendiri merupakan perkembangan lanjutan dari kajian behaviorisme dengan asumsi dasar terdapat pada reaksi seseorang terhadap sebuah stimulus tertentu. Stimulus menjadi keseluruhan entitas yang berasal langsung dari luar diri seseorang, termasuk kekuatan struktur dan institusi. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan kepemudaan sebagai kebijakan publik, penyelidikan signifikansi dan implikasi akan lebih terkonsentrasi terhadap reaksi kalangan pemuda berkaitan dengan kebijakan dibandingkan dengan materi muatan dari kebijakan sendiri. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa muatan dari kebijakan secara pragmatik akan menjadi stimulus untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan. Reaksi pemuda terhadap kebijakan ditentukan oleh sikap, motivasi dan hasrat tertentu yang secara normatif dapat dipicu dengan konten kebijakan sebagai stimulus dalam membentuk kepercayaan yang kuat terhadap implementor kebijakan. Untuk memberikan proses penyelidikan terhadap kinerja implementasi kebijakan kepemudaan, maka kualitas pemahaman berkaitan respons pemuda terhadap kebijakan sebagai stimulus tertentu menjadi langkah yang krusial.

Pondasi utama dari pendekatan behaviorisme terdapat dalam arah hubungan fungsional yang menghadirkan probabilitas luas untuk mendalami

konfigurasi dari tindakan secara distingtif (Carrara, 2018). Hal tersebut menjadikan behaviorisme sebagai tradisi intelektualitas dinamis yang dapat disesuaikan dengan berbagai arah pertanyaan masalah, perspektif baru bahkan konteks isu teraktual. Dalam analisis kebijakan kepemudaan bahwa pendekatan behaviorisme yang menekankan relasi menjadi langkah strategis pengembangan tindakan kalangan pemuda yang prososial melalui skema *Classical* dan *Operant Conditioning*, sehingga kinerja implementasi kebijakan kepemudaan akan berbanding lurus dengan daya akomodasi perilaku dari kalangan pemuda dalam jaringan kebijakan kepemudaan sendiri yang bahkan tidak mungkin terpisah dari distorsi dan kompetensi. Karena bagaimanapun juga, bentuk implikasi kebijakan dalam konteks persepsi kalangan pemuda mempunyai tendensi untuk berlaku reaktif secara berlebihan terhadap distorsi dari kelompok lain. Pronin dan Schmindt (2013) atas dasar bentuk distorsi yang relatif tidak disadari terhadap kebijakan, memberikan rekomendasi pemecahan masalah titik buta distorsi melalui peningkatan kesadaran, pendidikan dan situasi mentalitas dengan pendekatan yang berbasis psikologis secara potensial lebih efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan tersebut, maka dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan berkaitan pemetaan dasar-dasar behavioral dari transformasi kebijakan kepemudaan sebagai berikut. *Pertama*, sebagai upaya menunjang proses pembangunan pemuda yang konstruktif, maka kerangka kebijakan kepemudaan itu sendiri secara substantif harus memungkinkan pengaturan harmonis antara pikiran, pengalaman dan emosional pemuda sebagai bagian internal dari perilaku yang akan dikondisikan secara artifisial. *Kedua*, kerangka kebijakan kepemudaan dalam ruang skema implementasi harus diaktualisasikan menjadi program variatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan dengan alokasi waktu tertentu, karena perilaku tidak akan terpisahkan korelasinya dengan perilaku dalam waktu dan konteks tertentu. *Ketiga*, perubahan perilaku dalam taraf signifikansi tertentu dapat diupayakan melalui arah intervensi psikologis, maka pengaturan *default* kebijakan kepemudaan dapat secara holistik dipertimbangkan melalui pemetaan mekanisme hubungan kausalitas nyata dari *default* dan seleksi dari *default* kebijakan yang relevan. *Keempat*, karena secara alamiah lingkungan perkembangan akan menunjang perubahan baik dalam konteks perspektif maupun tindakan, maka kerangka kebijakan kepemudaan harus seksama memungkinkan terjadi kombinasi antara perilaku dan hubungan fungsional dengan lingkungan perkembangan melalui pengkondisian artifisial dari *default* kebijakan. *Kelima*, menimbang dalam behaviorisme intensional bahwa perilaku tidak lain

dari responsivitas terencana, maka kerangka kebijakan kepemudaan harus ditempatkan sebagai stimulus alami untuk meningkatkan probabilitas keterlibatan dalam rangka mencapai perkembangan yang dikondisikan melalui intensionalitas dari kelompok sasaran kebijakan.

5. REFERENSI

- Alexander, J.F. & Robbins, M.S. (2011). Functional Family Therapy. Dalam R.C. Murrihy., A.D. Kidman., & T.H. Ollendick (Penyunting), *Clinical Handbook of Assessing and Treating Conduct Problems in Youth* (hlm. 245-271). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6297-3_10.
- Anaya, H.D., Cantwell, S.M., & Rotheram-Borus, M.J. (2003). Sexual Risk Behaviors among Adolescents. Dalam A. Biglan., M.C. Wang., & H.J. Walberg (Penyunting), *Preventing Youth Problems* (hlm. 113-143). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6236-5_6.
- Asgeirsdottir, B.B. & Sigfusdottir, I.D. (2021). Positive Youth Development and Resilience Among Youth in Iceland: The Importance of Social Context and Self-Esteem for Life Satisfaction. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 203-218). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_14.
- Astone, N.M. dkk. (1999). Family Demography, Social Theory, and Investment in Social Capital. *Population and Development Review*, 25(1). <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.1999.00001.x>.
- Barr, M., Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Behaviorally Informed Regulation. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 440-462). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-030>.
- Baum, W.M. (2021). Introduction to Molar Behaviorism and Multiscale Behavior Analysis. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 43-62). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_4.
- Benartzi, S., Peleg, E., & Thaler, R. (2013). Choice Architecture and Retirement Saving Plans Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 245-263). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-018>.
- Benson, P.L., Flay, B., & Foster, S.L. (2003). The Prevention of Drug Abuse. Dalam A. Biglan., M.C. Wang., & H.J. Walberg (Penyunting), *Preventing Youth Problems* (hlm. 87-111). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6236-5_5.
- Biglan, A. & Severson, H.H. (2003). The Prevention of Tobacco Use. Dalam A. Biglan., M.C. Wang., & H.J. Walberg (Penyunting), *Preventing Youth Problems* (hlm. 63-85). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6236-5_4.
- Blaszczynski, A. & Farrell, E. A. (1998) Case Series of 44 Completed Gambling-Related Suicides. *Journal of Gambling Studies*, 14, 93-109. <https://doi.org/10.1023/A:1023016224147>.
- Bradley, G.L., Ferguson, S., & Zimmer-Gembeck, M.J. (2021). Parental Support, Peer Support and School Connectedness as Foundations for Student Engagement and Academic Achievement in Australian Youth. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 219-236). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_15.
- Bubolz, M.M. (2001). Family as Source, User, and Builder of Social Capital. *The Journal of Socio-Economics*, 30(2), 129-131. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(00\)00091-3](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(00)00091-3).
- Carrara, K. (2018). Nothing Can “Be” Other Than Through Its Relation. Dalam *Radical Behaviorism and Cultural Analysis* (hlm. 51-77). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74301-1_3.
- Carrara, K. (2018). *Radical Behaviorism and Cultural Analysis*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-74301-1>.
- Chanley, V.A., Rudolph, T.J., & Rahn, W.M. (2000). The Origins and Consequences of Public Trust in Government. *Public Opinion Quarterly*, 64(3), 239-256. <https://doi.org/10.1086/317987>.
- Citrin, J. (1974). Comment: The Political Relevance of Trust in Government. *American Political Science Review*, 68(03), 973-988. <https://doi.org/10.2307/1959141>.
- Coleman, J.S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, 95-120. <https://doi.org/10.1086/228943>.
- Congdon, W. (2013). Psychology and Economic Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 465-474). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-031>.
- Dahrendorf, R. (1979). *Life Chnces: Approaches to Social and Political Theory*. Cichago: University of Chicago.

- Dalton, R.J. (2005). The Social Transformation of Trust in Government. *International Review of Sociology*, 15(1), 133–154. <https://doi.org/10.1080/03906700500038819>.
- de Carvalho Neto, M.B. (2021). Comments on “Biological Behaviorism”. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 137-144). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_11.
- Dimitrova R. dkk. (2021). The 7Cs and Developmental Assets Models of Positive Youth Development in India, Indonesia and Pakistan. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 17-33). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_2.
- Dimitrova, R. dkk. (2021). Positive Youth Development in Bulgaria, Italy, Norway and Romania: Testing the Factorial Structure and Measurement Invariance of the 5Cs Model. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 267-281). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_18.
- Domínguez-Espinosa, A.C. dkk. (2021). Healthy Lifestyle Behaviors and the 5Cs of Positive Youth Development in Mexico. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 109-121). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_8.
- Donahoe, J.W. (2021). Biological Behaviorism. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 113-135). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_10.
- Dost-Gözkan, A., & Wiium N. (2021). Developmental Assets and Identity Among Emerging Adults in Turkey. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 153-173). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_11.
- Dukeshire, S., & Thurlow, J. (2002). *Understanding the Link Between Research and Policy*. Atlantic Health Promotion Research Centre, Dalhousie University: Rural Communities Impacting Policy Project.
- Dutra-Thomé L., & Ponciano E.L.T. (2021). The Relationship Between Emerging Adults and their Parents as PYD Promotive Factor in Brazil. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 123-134). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_9.
- Eberstadt, N. (2001). The Population Implosion. *Foreign Policy*, (123), 42-53. <https://doi.org/10.2307/3183154>.
- Eyberg, S.M. & Bussing, R. (2011). Parent–Child Interaction Therapy for Preschool Children with Conduct Problems. Dalam R.C. Murrihy., A.D. Kidman., & T.H. Ollendick (Penyunting), *Clinical Handbook of Assessing and Treating Conduct Problems in Youth* (hlm. 139-162). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6297-3_6.
- Fagan, M. dkk. (2021). Positive Youth Development and the Big Five Personality Traits in Youth from Belize. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 95-107). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_7.
- Fernandes, D. dkk. (2021). The 5Cs of Positive Youth Development in New Zealand: Relations with Hopeful Expectations for the Future and Life Satisfaction Among Emerging Adults. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 237-249). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_16.
- Fisher, P.A. (2003). The Prevention of Antisocial Behavior. Dalam A. Biglan., M.C. Wang., & H.J. Walberg (Penyunting), *Preventing Youth Problems* (hlm. 5-31). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6236-5_2.
- Fiske, S. & Krieger, L. (2013). Policy Implications of Unexamined Discrimination: Gender Bias in Employment as a Case Study. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 52-74). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-007>.
- Foxall, G.R. (2021). Intentional Behaviorism. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 151-189). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_13.
- Garcia, J. & Cohen, G. (2013). A Social Psychological Approach to Educational Intervention. Dalam E. Shafir (Penyunting),

- The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 329-348). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-023>.
- Ginwright, S., Cammarota, J., & Noguera, P. (2005). Youth, Social Justice, and Communities: Toward a Theory of Urban Youth Policy. *Social Justice*, 32(3) (101), 24-40. <https://www.jstor.org/stable/29768319>.
- Gomez-Baya, D., de Matos, M.G., & Wiium, N. (2021). Positive Youth Development and Subjective Happiness: Examining the Mediating Role of Gratitude and Optimism in Spanish Emerging Adults. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 187-202). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_13.
- Gopalan, M., & Pirog, M. A. (2017). Applying Behavioral Insights in Policy Analysis: Recent Trends in the United States. *Policy Studies Journal*, 45(S1), S82-S114. <https://doi.org/10.1111/psj.12202>.
- Greene, R.W. (2011). Collaborative Problem Solving. Dalam R.C. Murrihy., A.D. Kidman., & T.H. Ollendick (Penyunting), *Clinical Handbook of Assessing and Treating Conduct Problems in Youth* (hlm.193-220). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6297-3_8.
- Greenwood, P.W. dkk. (1996). *Diverting Children from a Life of Crime: Measuring Costs and Benefits*. Santa Monica, CA: Rand.
- Hakim, M.A.L. (2022). Transformasi Kebijakan Kepemudaan dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Antara Prosedur, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (Studi Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur) (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari <http://repository.upi.edu/id/eprint/81183>.
- Hakim, M.A.L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2022). Diskursus Kebijakan Kepemudaandalam Perspektif Behaviorisme dan Neo-Institusionalisme (Pendahuluan Studi Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur). *Jurnal Education and Development*, 10(3), 684-693. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3733>.
- Hardin, C. & Banaji, M. (2013). The Nature of Implicit Prejudice: Implications for Personal and Public Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 13-31). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-005>.
- Henggeler, S.W. (2012). Multisystemic Therapy: Clinical Foundations and Research Outcomes. *Psychosocial Intervention*, 21(2), 181-193. <https://doi.org/10.5093/in2012a12>.
- Jacobs, D.F. (2005). Youth Gambling in North America. Dalam J.L. Derevensky & R. Gupta. (Penyunting), *Gambling Problems in Youth* (hlm. 1-24). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/0-306-48586-9_1.
- Johnson, E. & Goldstein, D. (2013). Decisions by Default. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 417-427). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-028>.
- Jolls, C. (2013). Behavioral Economics Analysis of Employment Law. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 264-280). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-019>.
- Kabir, R.S. & Wiium, N. (2021). Positive Youth Development and Environmental Concerns Among Youth and Emerging Adults in Ghana. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* hlm. 81-94). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_6.
- Kosic, M., Wiium, N., & Dimitrova, R. (2021). Social Support Among Slovene Minority and Italian Majority Youth in Italy: Links with Positive Identity, Social Competence and Academic Achievement. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 175-186). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_12.
- Langhinrichsen-Rohling, J. (2005). Gambling, Depression, and Suicidality in Adolescents. *Gambling Problems in Youth*, 41-56. https://doi.org/10.1007/0-306-48586-9_3.
- Laurenti, C. (2021). The Molar View of Behavior: A Paradigm Shift in Behavior Analysis?. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 63-71). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_5.
- Lazzeri, F. (2021). Purposive Behavior and Psychological Categories: Thoughts on Teleological Behaviorism. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 21-32). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_2.

- Leridon, H. (2020). World Population Outlook: Explosion Or Implosion?. *Population Societies*, (1), 1-4.
- Lerner, R.M. dkk. (2006). Young People Are Resources to Be Developed: Promoting Positive Youth Development: Lessons from the 4-H Study through Adult-Youth Relations and Community Assets. Dalam E.G. Clary & J.E. Rhodes (Penyunting), *Mobilizing Adults for Positive Youth Development* (hlm. 19-39) Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-29340-X_2.
- Li, X., He, S., & Chen, BB. (2021). The Five Cs Model of Positive Youth Development and the PATHS Project in Mainland China. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 63-79). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_5.
- Lichtenberg, J. (2013). Paternalism, Manipulation, Freedom, and the Good. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 494-498). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-034>.
- Loeber, R. dkk. (1993). Developmental Pathways in Disruptive Child Behavior. *Development and Psychopathology*, 5(1-2), 103-133. <https://doi.org/10.1017/S0954579400004296>.
- Loewenstein, G., John, L., & Volpp, K. (2013). Using Decision Errors to Help People Help Themselves. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 361-379). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-025>.
- Lopes, C.E. (2021). What Is the Theory of Theoretical Behaviorism?. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 97-105). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_8.
- Manrique-Millones, D.L. dkk. (2021). The 7Cs of Positive Youth Development in Colombia and Peru: A Promising Model for Reduction of Risky Behaviors Among Youth and Emerging Adults. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 35-48). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_3.
- Mazzone, M. & Campisi, E. (2013). Distributed intentionality: A model of intentional behavior in humans. *Philosophical Psychology*, 26(2), 267-290. <https://doi.org/10.1080/09515089.2011.641743>.
- McMahon, R.J., Long, N., & Forehand R.L. (2011). Parent Training for the Treatment of Oppositional Behavior in Young Children: Helping the Noncompliant Child. Dalam R.C. Murrihy., A.D. Kidman., & T.H. Ollendick (Penyunting), *Clinical Handbook of Assessing and Treating Conduct Problems in Youth* (hlm. 163-193). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6297-3_7.
- Miller, A.H. (1974). Political Issues and Trust in Government: 1964-1970. *American Political Science Review*, 68(03), 951-972. <https://doi.org/10.2307/1959140>.
- Miller, D. & Prentice, D. (2013). Psychological Levers of Behavior Change. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 301-309). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-021>.
- Mullainathan, S. & Shafir, E. (2013). Decision Making and Policy in Contexts of Poverty. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 281-298). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-020>.
- Oliveira-Castro, J.M. (2021). Behavior Analysis and Psychological Concepts: Commentary on Foxall's Intentional Behaviorism. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 191-209). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_14.
- Payne, G. & Payne, J. (2004). *Key Concepts in Social Research*. London: Sage Publication.
- Pronin, E. & Schmidt, K. (2013). Claims and Denials of Bias and Their Implications for Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 195-216). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-015>.
- Putra, F. & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktik*. Depok: Pustaka PL3ES.
- Rachlin, H. (2021). Teleological Behaviorism: Origins and Present Status. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 3-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_1.
- Rahn, W.M. & Transue, J. E. (1998). Social Trust and Value Change: The Decline of Social Capital in American Youth, 1976-1995. *Political Psychology*, 19(3), 545-565. <https://doi.org/10.1111/0162-895X.00117>.
- Redelmeier, D. (2013). Behavioral Decision Science Applied to Health-Care Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 475-480). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-032>.

- Ross, L. (2013). Perspectives on Disagreement and Dispute Resolution: Lessons from the Lab and the Real World. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 108-125). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-010>.
- Shelton, J., Richeson, J., & Dovidio, J. (2013). Biases in Interracial Interactions: Implications for Social Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 32-51). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-006>.
- Sickmund, M., Snyder, H.N., & Poe-Yamagata, E. (1997). *Juvenile Offenders and Victims: 1997 Update on Violence*. Pittsburgh, PA: National Center for Juvenile Justice.
- Smith, T.W. (1997). Factors Relating to Misanthropy in Contemporary American Society. *Social Science Research*, 26(2), 170–196. <https://doi.org/10.1006/ssre.1997.0592>.
- Snyder, H. & und Sickmund, M. (1995). *Juvenile Offenders and Victims: A national report*. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Problems, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- Stinchfield, R. (2005). Demographic, Psychosocial, and Behavioral Factors Associated with Youth Gambling and Problem Gambling. *Gambling Problems in Youth*, 27–39. https://doi.org/10.1007/0-306-48586-9_2.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thaler, R., Sunstein, C., & Balz, J. (2013). Choice Architecture. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 428-439). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-029>.
- Thomas, C.W. (1998). Maintaining and Restoring Public Trust in Government Agencies and their Employees. *Administration & Society*, 30(2), 166–193. <https://doi.org/10.1177/0095399798302003>.
- Tyler, T. (2013). The Psychology of Cooperation: Implications for Public Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 77-90). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-008>.
- Ubel, P. (2013). Beyond Comprehension: Figuring Out Whether Decision Aids Improve People's Decisions. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 351-360). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-024>.
- Uka, F. dkk. (2021). Developmental Assets, Academic Achievement and Risky Behaviors Among Albanians in Albania, Kosovo, Macedonia and Serbia. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 135-151). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_10.
- Wansink, B. (2013). Turning Mindless Eating into Healthy Eating. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 310-328). Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845347-022>.
- Webster-Stratton, C.H. & Reid, M.J. (2011). The Incredible Years Program for Children from Infancy to Pre-adolescence: Prevention and Treatment of Behavior Problems. Dalam R.C. Murrihy., A.D. Kidman., & T.H. Ollendick (Penyunting), *Clinical Handbook of Assessing and Treating Conduct Problems in Youth* (hlm. 117-138). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6297-3_5.
- Widmer, E.D. (2006). Who are My Family Members? Bridging and Binding Social Capital in Family Configurations. *Journal of Social and Personal Relationships*, 23(6), 979–998. <https://doi.org/10.1177/0265407506070482>.
- Wiium, N. & Kozina, A. (2021). Country and Gender Differences in Developmental Assets Among Youth and Emerging Adults in Ghana and Norway. Dalam R. Dimitrova & N. Wiium (Penyunting), *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts* (hlm. 251-265). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5_17.
- Winters, K.C. dkk. (2005). Gambling and Drug Abuse in Adolescence. *Gambling Problems in Youth*, 57–80. https://doi.org/10.1007/0-306-48586-9_4.
- Woodman, D. & Wyn, J. (2012). Youth Policy and Generations: Why Youth Policy Needs to “Rethink Youth.” *Social Policy and Society*, 12(02), 265–275. <https://doi.org/10.1017/s1474746412000589>.
- Wynne, H., Smith, G., & Jacobs, D.(1996). *Adolescent gambling and Problem Gambling in Alberta*. Edmonton, Alberta: Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission.
- Zucker, R.A. (2003). Causal Structure of Alcohol Use and Problems in Early Life. Dalam A. Biglan., M.C. Wang., & H.J. Walberg (Penyunting), *Preventing Youth Problems* (hlm. 33-61). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6236-5_3.